



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



*Clearing House*  
Pengadaan

## ***CLEARING HOUSE* PENGADAAN SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PENGADAAN**

Disampaikan oleh:

**TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA**

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah  
LKPP

# Latar Belakang

Banyaknya tekanan dari berbagai pihak

Ketakutan akan dampak hukum

Memahami pengadaan hanya sebatas aturan

Ragu mengambil keputusan

Pelayanan konsultasi kurang efektif



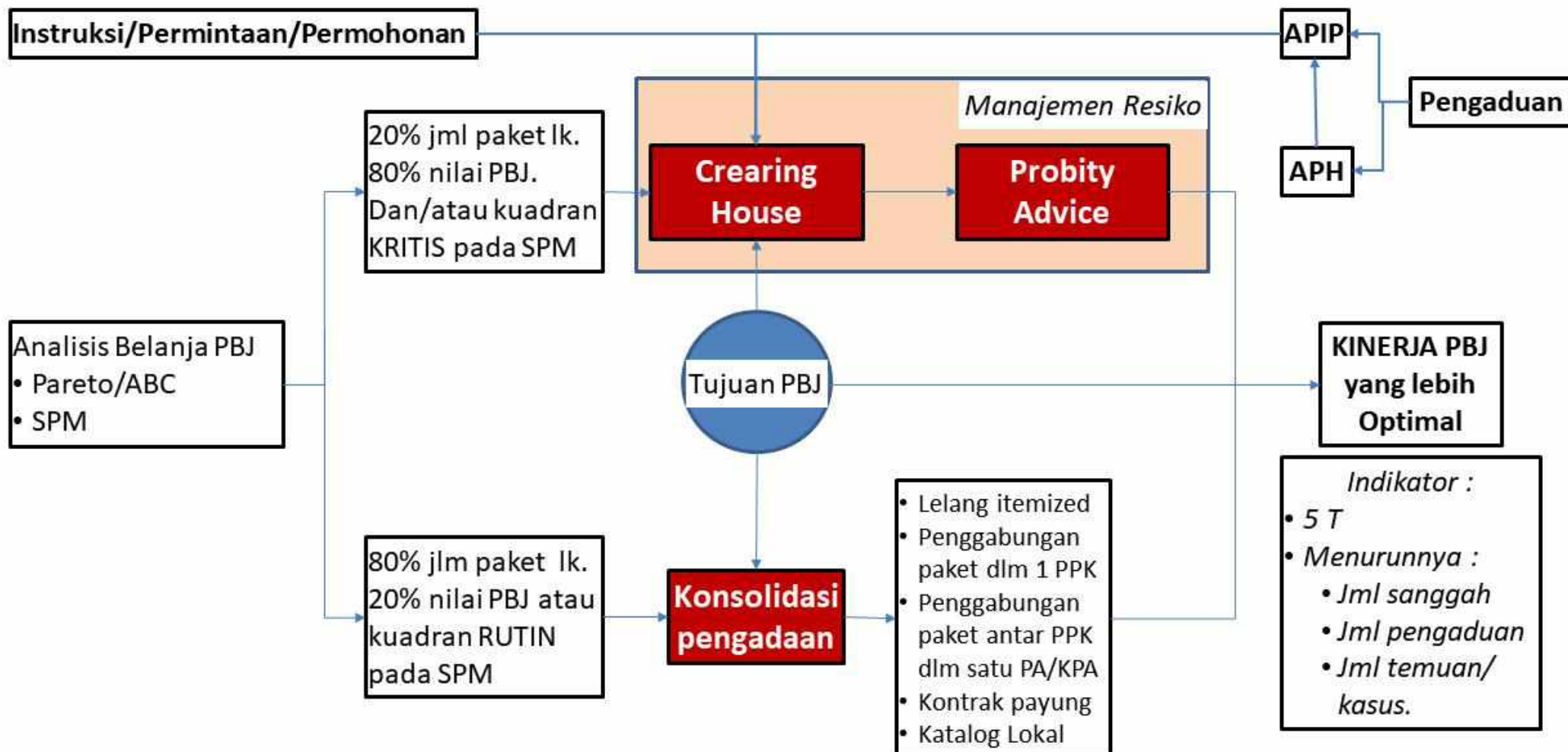
*Dibutuhkan solusi  
penanganan  
permasalahan yang  
**komprehensif,  
cepat, dan efektif***



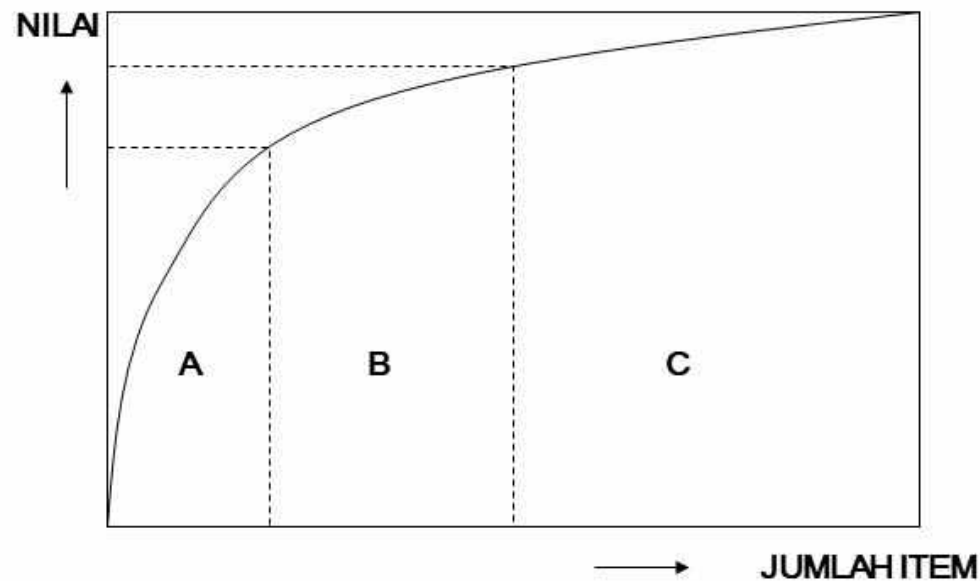
## *Clearing House* Pengadaan

**Clearing House Pengadaan** adalah Forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif

# OPTIMASI KINERJA PBJ



# Klasifikasi ABC (Konsep Pareto)



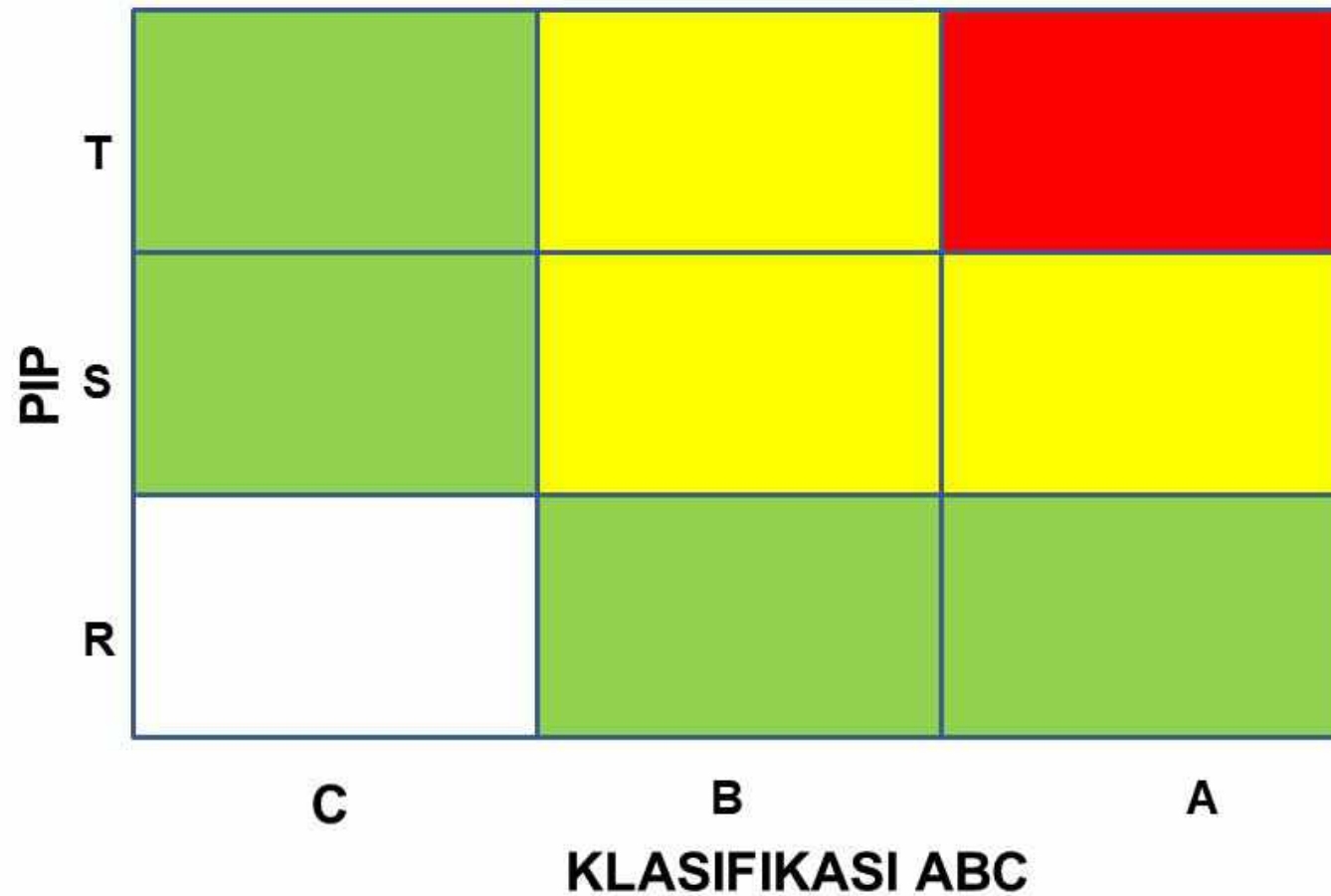
**PENGENDALIAN :**

**A → Ketat**

**B → Sedang**

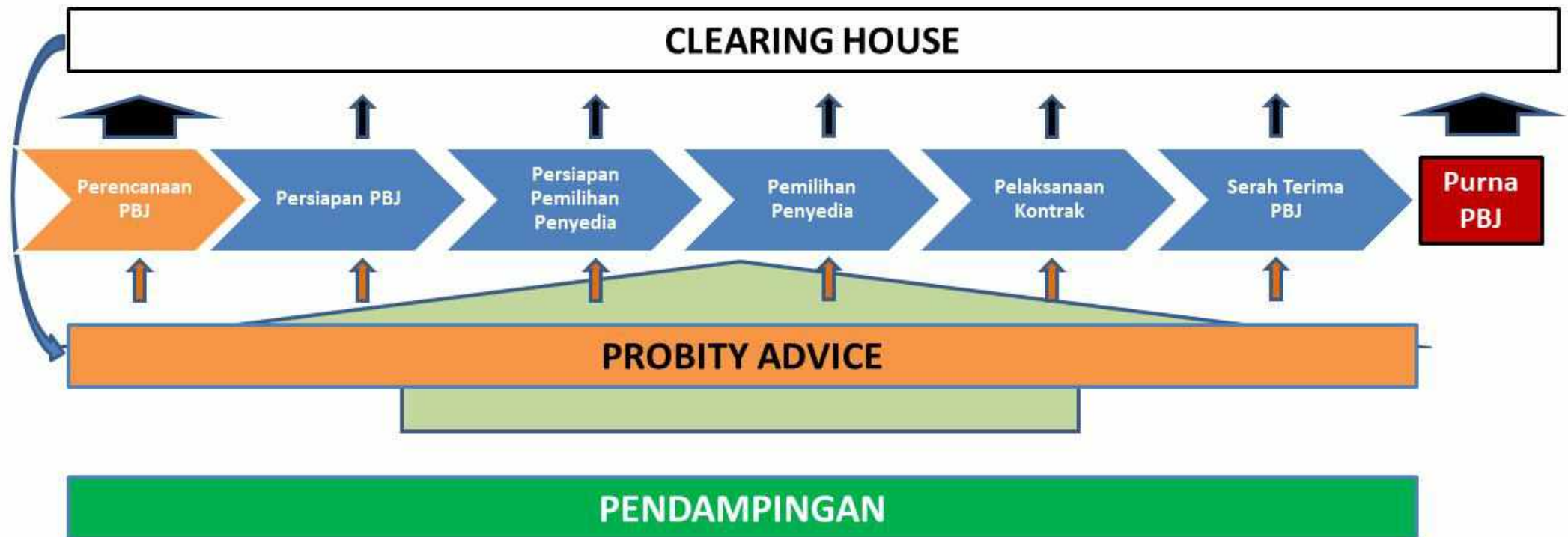
**C → Longgar**

# THE SUPPLY POSITIONING MODEL





# HUBUNGAN CLEARING HOUSE, PROBITY ADVICE, DAN PENDAMPINGAN



# Tujuan *Clearing House* Pengadaan



- Mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif, dan transparan
- Meningkatkan kapabilitas KLPD dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan
- Mengurangi risiko sengkah, pengaduan dan permasalahan hukum
- Menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pengadaan



## DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan LKPP No 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.....

# Sekretariat

*Clearing House* Pengadaan

Dapat ditempatkan sesuai dengan kesiapan  
K/L/PD masing-masing



• **APIP**

atau

• **UKPBJ**

atau

• **Unit Kerja Lainnya**

yang dianggap mampu

## Bentuk dan Tugas Sekretariat

*Clearing House*  
Pengadaan

- Berbentuk Ad Hoc
- Memfasilitasi pelaksanaan Forum *Clearing House* Pengadaan
- Mendokumentasikan pelaksanaan *Clearing House* Pengadaan

## Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *SIKaP*; dan
- c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

**UKPBJ**

Per. LKPP No. 14 Tahun 2018

Perpres No. 16 Tahun 2018

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.



**APIP**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2008  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*\*)Kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi*



# Kriteria Permasalahan



# Clearing House Pengadaan



Masalah  
Pengadaan



Forum



Solusi



Clearing House  
Pengadaan



Data



# Alur Proses *Clearing House* Pengadaan



Usulan  
Pembahasan



Sekretariat  
mengkoordinir  
pelaksanaan  
*Clearing House*  
Pengadaan



Pelaksanaan Forum  
*Clearing House*  
Pengadaan

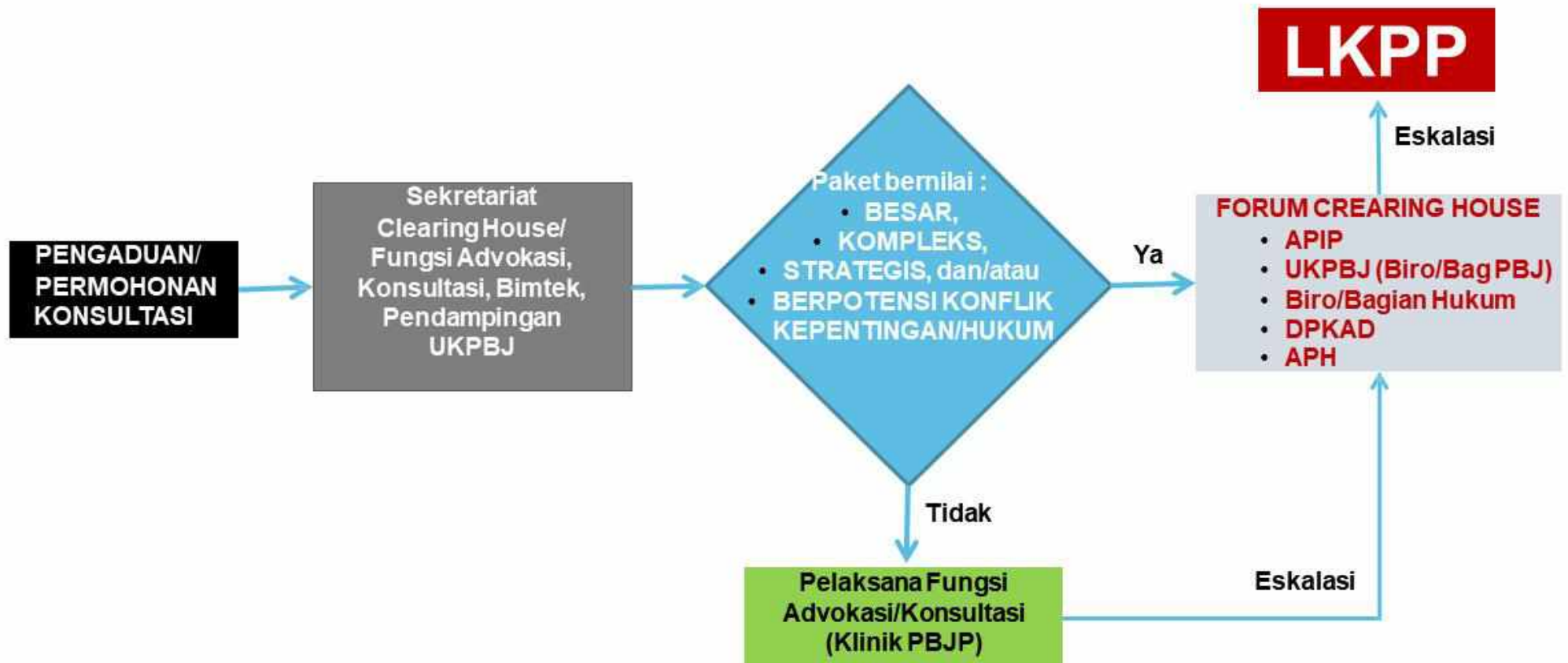


Pelaku pengadaan dapat  
mengambil keputusan  
berdasarkan rekomendasi



Sekretariat  
mendokumentasikan  
hasil *Clearing House*  
Pengadaan

# GARIS BESAR ALUR PELAKSANAAN CLEARING HOUSE

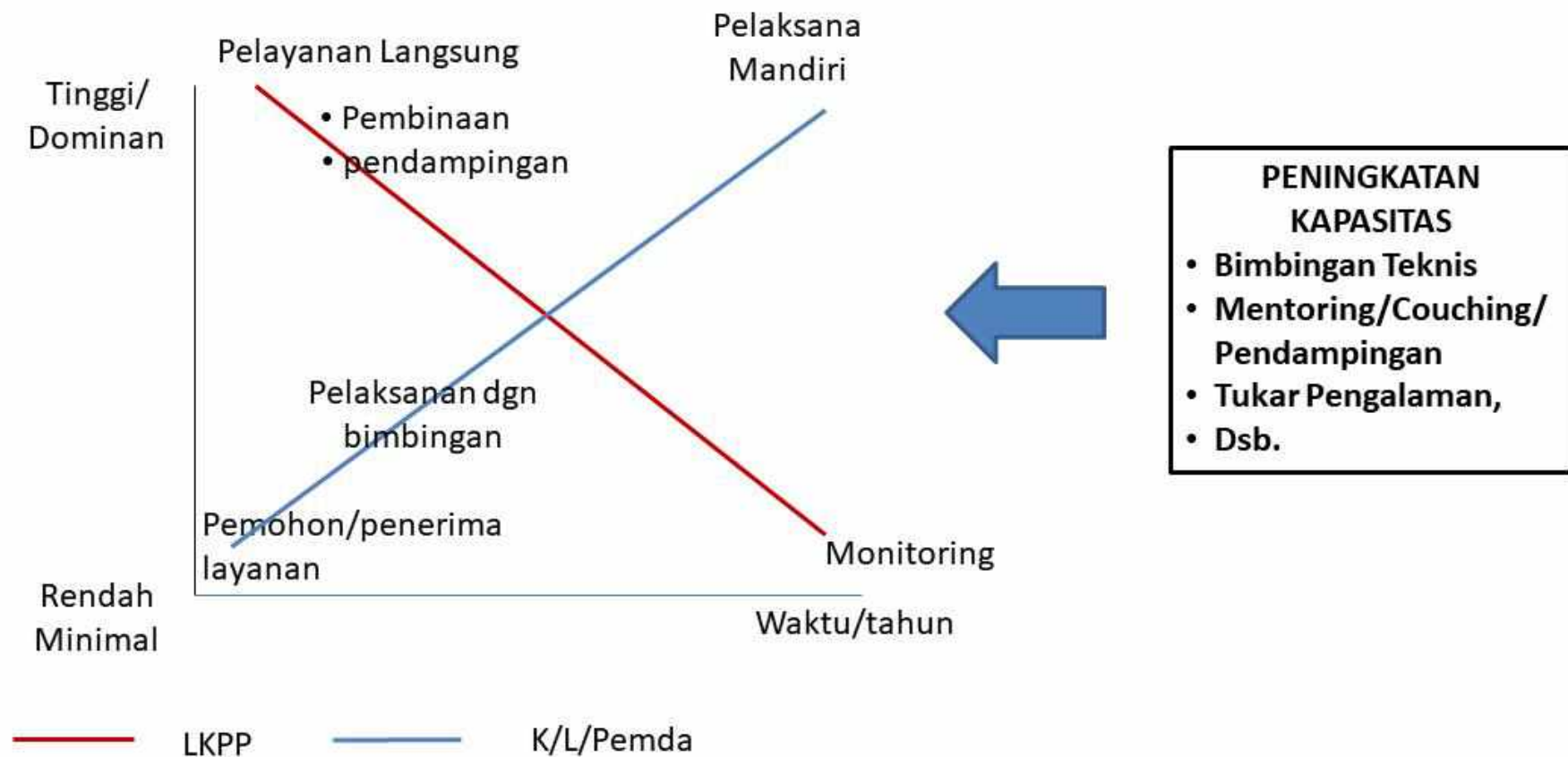


# Tahapan

- Diseminasi
- Diskusi/FGD
- Konsultasi



## PERGESERAN PERAN DALAM PELAKSANAAN **CLEARING HOUSE**, PROBITY ADVICE, DAN KONSOLIDASI PBJ





**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Terima Kasih**